

Memaknai Ulang Istimewa: Membangun Kelas dalam Pendidikan Menengah Atas di Daerah Istimewa Yogyakarta

Indra Rahayu Ningsih¹, Tomy Lovendo^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Yogyakarta

*Corresponding author, e-mail: indrasahayuningsih@uny.ac.id.

Abstrak

D. I. Yogyakarta dianggap sebagai wilayah ideal dalam akses pendidikan. Namun, realitanya ada benturan kualitas pendidikan dan akses pendidikan yang belum merata. Ketidakmerataan akses pendidikan dilihat melalui Pemikiran Bourdieu dalam aspek habitus, modal, dan medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketersediaan sekolah di pendidikan menengah atas di D.I Yogyakarta dan bagaimana kerangka teori Bourdieu melihat fenomena akses pendidikan menengah atas di D.I Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder yaitu data BPS, DAPODIK, data Kemenag yang kemudian disinkronkan dengan peraturan Pemerintah Provinsi D. I. Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini antara lain 1) dominasi sekolah swasta di pendidikan menengah atas, 2) kebijakan zonasi (domisili) memberikan akses pada naiknya jumlah sekolah swasta, 3) perbedaan pembiayaan pada sekolah swasta menjadi langkah awal terciptanya eksklusifitas pada pendidikan menengah atas D.I. Yogyakarta. Analisis pada ketiga temuan mengarah pada kondisi pendidikan menengah atas menunjukkan adanya lapisan-lapisan yang dipengaruhi oleh habitus, modal, dan medan dari peserta didik. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa, sistem pendidikan yang berkembang semakin mengarah pada lebarnya kesenjangan yang dialami oleh peserta didik dengan latar belakang sosial yang berbeda.

Kata kunci: Bourdieau; Kelas Sosial; SMA.

Abstract

D. I. Yogyakarta is considered an ideal region for access to education. However, the reality is that there is a clash between the quality of education and the uneven access to education. The uneven access to education is viewed through Bourdieu's thinking in the aspects of habitus, capital, and field. This research aims to understand the availability of schools in upper secondary education in D. I. Yogyakarta. This study uses a qualitative approach by analyzing secondary data, namely BPS data, DAPODIK data, and Ministry of Religious Affairs data, which are then synchronized with the regulation of the D. I. Yogyakarta Provincial Government. The findings of this research include: 1) the dominance of private schools in upper secondary education, 2) the zoning policy (domicile) providing access to an increase in the number of private schools, 3) differences in funding for private schools being the initial step towards the creation of exclusivity in upper secondary education in D. I. Yogyakarta. The analysis of the three findings points to the condition of upper secondary education, showing layers influenced by the habitus, capital, and field of the students. Therefore, it can be concluded that the developing education system is increasingly leading to a widening gap experienced by students from different social backgrounds.

Keywords: Bourdieau; SMA; Social class.

How to Cite: Ningsih, I. R. & Lovendo, T. (2026). Memaknai Ulang Istimewa: Membangun Kelas dalam Pendidikan Menengah Atas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Naradidik: Journal of Education & Pedagogy*, 5(1), 173-187.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by author.

Pendahuluan

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki predikat sebagai “Kota Pelajar”. Julukan ini mencerminkan DIY adalah daerah yang unggul secara akademis dengan jumlah sekolah yang tinggi baik di Tingkat dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Selain itu, predikat tersebut juga dibuktikan dalam tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan menengah mencapai 94,02% dan pendidikan tinggi mencapai 74,08% (BPS DIY, 2024). Situasi ini memberikan gambaran bahwa DIY merupakan wilayah ideal dimana akses pendidikan yang berkualitas terbuka untuk siapa saja. Pendidikan berkualitas yang mampu mendorong mobilitas sosial dan peningkatan intelektualitas (Arifin, 2017; Lin, 2020) Predikat sebagai kota pendidikan saat ini menjadi branding yang diberikan oleh masyarakat terhadap provisi Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu, pendidikan yang ada di wilayah D.I Yogyakarta memberikan angin segar bagi masyarakatnya atau justru menjadi medan yang memperparah ketimpangan antar masyarakatnya.

Dibalik branding membanggakan tersebut, terdapat realitas yang cukup berbeda. Laporan PISA (*Programme for International Student Assessment*) konsisten menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat dalam kesenjangan akses pendidikan dan kualitas antar sekolah (OECD, 2023). Walaupun data PISA bersifat nasional, dampaknya terasa sampai di tingkat provinsi (Suryani et al., 2023). Branding yang dibangun tentang kota pelajar saat ini mulai berbenturan dengan fakta bahwa kualitas pendidikan dan akses pendidikan belum merata.

Realitas bahwa kualitas pendidikan dan akses pendidikan yang belum merata muncul anggapan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Perbedaan status sekolah bisa menunjukkan ketimpangan dan kedepannya perbedaan terus diproduksi (Huber et al., 2020). Pola yang dibangun antara sekolah negeri dan sekolah swasta di DIY dianggap bukan hanya perbedaan status kepemilikan antara pemerintah dan Yayasan, namun struktur yang menunjukkan tingkat sosial dan ekonomi.

Sekolah negeri merupakan sekolah yang dianggap sebagai institusi superior (Tarkhnishvili et al., 2022). Dalam hal ini sekolah negeri yang favorit merupakan tempat yang cukup kompetitif (Azkiyani et al., 2023; Mayasari & Paidi, 2022). Berkembangnya sekolah negeri favorit, menjadi wujud bahwa pendidikan menjadi terkotak-kotak. Untuk itu pemerintah kemudian membuat kebijakan baru yaitu “Sistem Zonasi”. System ini memiliki tujuan pemerataan akses pendidikan (Syakarofath et al., 2020a; Wahyudi & Lutfi, 2019). Namun pada praktiknya, strategi-strategi baru muncul untuk mengakali system tersebut (Azhari & Suryanef, 2019; Devi et al., 2022; Syakarofath et al., 2020b; Wulandari et al., 2022). Banyak keluarga kelas menengah atas merekayasa system ini dengan pindah domisili dan menggunakan bimbingan belajar secara intensif agar anaknya bisa masuk melalui jalur prestasi (Alfian, 2019; Mallevi Agustin Ningrum et al., 2022). Mampu masuk ke sekolah negeri favorit merupakan akses untuk ke perguruan tinggi favorit (Karjo, 2020). Tidak bisa dihindari, kadang sekolah negeri sudah memiliki rekam jejak alumni yang sudah masuk di PTN/ PTS favorit sebelumnya. Upaya apapun dilakukan untuk masuk ke sekolah negeri yang favorit. Sekolah negeri yang secara kebijakan bisa diakses secara gratis, pada perjalanannya harus diimbangi biaya lain yang tentunya tidak murah.

Sekolah swasta memiliki karakteristik yang sangat luas dan terbagi dalam kotak-kotak kecil (Cakranegara, 2021). Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sekolah swasta memiliki afiliasi pada Yayasan beda, agama, maupun kurikulum internasional. Sekolah swasta elit di DIY menawarkan berbagai fasilitas yang lengkap, relasi yang kuat dan kualitas yang setara bahkan lebih dari sekolah negeri (Pracipta, 2021). Tawaran ini tentunya diimbangi dengan biaya sekolah yang tinggi. Sekolah elit menjadi pilihan utama untuk masyarakat kalangan ekonomi atas (Pracipta, 2021). Di sisi yang lain, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak sekolah swasta yang merupakan sekolah pilihan kedua. Sekolah yang merupakan pilihan untuk siswa yang tidak berhasil masuk ke sekolah negeri. Sekolah swasta ini merupakan sekolah yang berada di wilayah pinggiran atau bahkan sekolah swasta yang dipilih oleh siswa-siswa dengan kondisi perekonomian menengah ke bawah. Sekolah swasta ini kemudian lebih ke arah mendukung kebijakan nasional dengan kemampuan sederhana dan keterbatasan berbagai fasilitasnya. Sekolah swasta ini sering kali mendapat stigma intitusi kelas Tengah yang mempengaruhi kualitas dan peluang lulusannya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa teori reproduksi sosial berlangsung dalam konteks pendidikan. Bourdieu menegaskan bahwa system pendidikan bukan tempat yang netral, namun sebagai tempat berbagai bentuk modal seperti modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial dipertemukan (Hart, 2019). Bentuk modal yang berkembang di DIY meliputi modal ekonomi yang menunjukkan apakah keluarga mampu membiayai pendidikan di sekolah swasta elit atau pilihan lain dengan berinvestasi pada bimbingan belajar untuk masuk ke sekolah negeri favorit. Modal budaya terlihat dari kebiasaan yang berkembang di dalam keluarga (Sullivan, 2001). Bagaimana keluarga mencukupi bahan bacaan, bagaimana keluarga menggunakan Bahasa. Keduanya tentunya mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sekolah-sekolah favorit bahkan sampai ke bagaimana persiapan untuk masuk ke sekolah negeri

favorit. Selanjutnya modal social, para orang tua telah menciptakan pola relasi yang memudahkan anaknya untuk masuk ke sekolah yang diharapkan.

Hasil beberapa penelitian menjelaskan bahwa reproduksi kelas sosial pada pendidikan terpraktik melalui pedagogis, kurikulum, dan struktur institusional. Collins (2011) menjelaskan dalam kegiatan literasi sekolah memreproduksi keunggulan siswa kelas menengah karena modal budaya yang hampir sama dengan norma sekolah. Diperkuat oleh Jæger & Møllegaard (2017) yang secara kuantitatif menjelaskan modal budaya dan bias guru mengarah pada *advantage cycle* dengan memberikan keuntungan pada kelompok tertentu. Luo et al. (2022) memberikan penekanan bahwa dalam reproduksi sosial di dunia pendidikan ada peran kekuasaan epistemik dan akses digital sebagai bentuk modal baru dalam neoliberal. Sejalan dengan pernyataan Yamamoto (2023) bahwa kebijakan modern pada praktiknya memperkuat dominasi kelas menengah melalui standar evaluasi, keterlibatan orang tua, dan performa di sekolah. Beberapa buku memperkuat pemahaman tersebut. Karya Baars (2017) menjelaskan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat reproduksi nilai-nilai dominan. Dème (2024) dalam karyanya menyebutkan bahwa tekanan ekonomi keluarga menjadi faktor kunci pada reproduksi sosial di dunia pendidikan. Holloway & Pimlott-Wilson, (2019) menguatkan pandangan Dème dengan menjelaskan bahwa relasi keluarga dan sekolah berpengaruh pada pencapaian status seseorang.

Beberapa penelitian dari Indonesia juga menjelaskan adanya reproduksi kelas dalam pendidikan. Meipiani et al. (2021) menemukan ketimpangan akses dan perbedaan modal keluarga menciptakan pola keunggulan bagi siswa kelas menengah. Sesuai dengan penelitian (Mua, 2017) menjelaskan pelajar di wilayah Papua mengalami tekanan kuasa simbolik melalui habitus dan relas sosial yang mempersempit ruang keberhasilan akademik. Diperkuat dengan Allolayuk (2021) yang melihat bahwa sekolah adalah distribusi ulang modal budaya dan simbolik dan memperkuat kesenjangan sosial. Hal ini dilihat Alloayuk dalam bingkai pemikiran Bourdieu. (Fathul et al., 2023) dalam penelitiannya menjelaskn bahwa stratifikasi sosial terlihat dalam perbedaan akses fasilitas, jaringan, dan partisipasi di salah satu lembaga perguruan tinggi. Kelas menengah yang memiliki modal sosial dan kultural yang kuat lebih mudah untuk memenuhi standar institusi. Dari penelitian-penelitian di atas terkonfirmasi bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih sangat rentan menjadi reproduksi kelas sosial. Reproduksi kelas sosial tersebut terjadi melalui interaksi antara ekonomi, budaya, simbol, dan kultur di institusi.

Pada konteks modal ekonomi, budaya, dan social system sekolah negeri maupun swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya stratifikasi dan mengarah pada legitimasi ketimpangan dari satu generasi ke generasi yang lain. Pilihan sekolah adalah tanda kelas sosial yang akhirnya membentuk fase hidup yang berbeda secara mendasar bagi para siswa.

Konsep Habitus merupakan hasil pikiran Bourdieu yang sentral. Habitus dianggap sebagai dasar untuk mengerti bagaimana tatanan sosial dapat terus ada tanpa paksaan fisik, namun tertanam ke dalam tubuh dan pikiran seseorang (Schirone, 2023). Habitus diperoleh melalui proses Panjang yang dimulai dari hari pertama kehidupan, terutama melalui proses di lingkungan keluarga. Bourdieu memberikan penekanan bahwa proses habitus dilakukan secara tidak sadar melalui "osmosis sosial pasif" (Bourdieu, 1986). Seorang anak yang melihat dan menyerap cara perilaku, berbicara, berjalan dan berpikir tanpa adanya instruksi formal. Pada proses ini anak kemudian belajar apa yang pantas dan tidak untuk dilakukan. Proses tidak berhenti pada titik keluarga, ada proses dari lingkungan sekunder yang melanjutkan perannya. Bagi kelas sosial dominan, muncul penguatan dari institusi seperti sekolah yang kemudian menjadi prinsip untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan (Tan & Liu, 2022).

Kemampuan yang sudah dimiliki oleh siswa yang berada di sekolah negeri favorit atau sekolah swasta elit merupakan habitus yang berbeda dengan anak-anak di sekolah negeri atau sekolah swasta elit. Bourdieu menjelaskan bahwa perbedaan kualitas seseorang adalah hasil pembentukan habitus di lingkungan seseorang (Tan & Liu, 2022). Habitus seorang anak dari kelas sosial atas yang dibentuk pada lingkungan keluarga yang berkecukupan pada modal budaya akan dihargai oleh system pendidikan kita. Hal ini terlihat pada penggunaan Bahasa, kedisiplinan belajar, seni, sampai cara berpikir analitis. Ketika seorang anak memasuki dunia pendidikan, habitus secara alami sudah sesuai dengan aturan dan harapan yang ada di sekolah. Anak-anak ini terlihat cerdas dan berbakat. Namun sebaliknya, anak-anak dari kelas menengah ke bawah yang secara ekonomi masih terbatas memungkinkan memiliki habitus yang berbeda. Karena secara budaya tidak didukung (Hong & Zhao, 2015). Anak-anak ini dibentuk pada habitus untuk bertahap hidup yang tunduk pada apa yang terjadi. Modal budaya tersebut membawa mereka dicap sebagai seorang yang tidak mampu, tidak ada motivasi, bahkan sulit untuk menerima pelajaran.

Pada akhirnya, habitus merupakan kunci untuk mengubah keberuntungan sosial yang diwariskan menjadi sebuah prestasi bahkan kualifikasi individu. Habitus seakan berfungsi untuk membenarkan dan melanggengkan ketidaksetaraan dengan cara mengaburkan apa yang diperoleh secara sosial dengan

diperoleh secara alami (Tan & Liu, 2022). Habitus memberikan Gambaran bahwa dominasi diproduksi melalui internalisasi persepsi yang membuat tampak benar.

Bourdieu menjelaskan bahwa modal ekonomi penting sebagai dasar dalam kekuasaan yang lain (Bourdieu, 1986). Dalam hal lain, modal ekonomi perlu diperhalus dalam modal yang lain seperti modal budaya dan simbolik. Uang banyak yang diperlihatkan menunjukkan adanya kesombongan, namun uang yang diubah dalam bentuk kelas, atau keahlian menghasilkan prestise tertentu. Merujuk pada asset non finansial yang memberikan prestise dalam sosial dan budaya, Bourdieu kemudian mengidentifikasi pada tiga jenis modal budaya: 1) modal budaya yang menubuh (*embodied state*) yaitu modal budaya yang terinteranalisis dan tak terpisahkan dengan habitus seseorang. Misalnya seperti cara berpikir, sikap perilaku, dan estetika (4). Modal seperti ini tidak bisa dimiliki secara instan, namun perlu waktu dan usaha yang Panjang (11). Modal budaya sebagai *embodied state* menjadi sumber keuntungan yang sulit dibandingkan dengan modal yang lain (Štrangarić & Lukić, 2024).

Modal budaya dalam bentuk fisik yang dimiliki seseorang meliputi koleksi buku, lukisan, kamus, dan teknologi canggih (Štrangarić & Lukić, 2024). Ketersediaan barang seperti ini tentunya karena kepemilikan material. Dalam hal ini modal budaya ada dalam bentuk objek fisik, dimana objek fisik ini bisa dimiliki secara material namun perlu adanya *embodied state* agar barang-barang ini bisa dimanfaatkan secara baik. Seseorang perlu membaca buku-buku yang dimiliki, memanfaatkan teknologi yang dimiliki agar barang-barang ini tidak hanya sebagai objek yang dimiliki.

Selain modal yang bersifat wujud seperti kepemilikan barang, modal budaya juga terjadi melalui benda yang terlembagakan (Štrangarić & Lukić, 2024). Bentuk modal budaya ini merupakan modal yang sudah terakui dari institusi-institusi tertentu, misalnya ijazah, gelar akademik, maupun sertifikat. Institusi ini memberikan nilai yang dapat ditukarkan di pasar kerja, misalnya ijazah dari institusi bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Pada situasi ini, banyak pasar kerja yang menginginkan kuaifikasi akademik dari institusi-institusi tertentu yang dianggap bagus. Proses ini menurut Boudieu disebut alkimia sosial, yaitu melegitimasi pemiliki kualifikasi kemudia memberinya akses ke posisi yang menguntungkan.

Modal selanjutnya dalam pandangan Bourdieu adalah modal sosial. Modal ini terdiri dari sumber daya yang bersumber dari jaringan hubungan yang lama terbangun yang saling kenal (Ignatow & Robinson, 2017). Modal sosial berwujud koneksi dimana nilai dari modal sosial bergantung pada aspek kepemilikan modal yang lain seperti modal ekonomi dan modal budaya (Ignatow & Robinson, 2017). Menjalin hubungan dengan orang yang berkuasa akan memberikan dampak pada akses ke sumber daya yang tidak dapat diperoleh. Modal sosial ini terus dipelihara melalui pemberian hadiah, jasa, kunjungan agar relasi tetap terjaga.

Ketiga modal di atas memberikan dampak pada munculnya modal simbolik. Dimana ketiga modal disalahpahami dan diakui secara sah (Bourdieu, 1986). Modal ekonomi tidak hanya uang namun bentuk kesuksesan, modal budaya dilihat sebagai kecerdasan, dan modal sosial sebagai bentuk pengaruh. Ketiga dampak ini menjadi modal simbolik yaitu bentuk prestise, kehormatan, dan wibawa. Gagasan konvertibilitas yang diusung oleh Bourdieu menunjukkan adanya upaya untuk mengubah bentuk modal ke bentuk laun untuk meningkatkan posisi di ruang sosial (Mustikasari et al., 2023). Konvertibilitas inilah yang dianggap Bourdieu menjadi strategi reproduksi kelas sosial.

Habitus merupakan struktur yang terinternalisasi, kemudian modal merukana sumber daya, poin ketiga pemikiran Bourdie dalam hal ini adalah medan. Medan (field) merupakan tempat sosial dimana perjuangan untuk mendapatkan modal tersebut terjadi. Medan adalah lingkup sosial dimana agen-agen mendapatkan posisi mereka (Schirone, 2023). Medan merupakan jaringan yang didalamnya terdapat jalinan objektif antar posisi. Posisi setiap agen ditentukan oleh modal yang mereka milik. Agen yang memiliki modal besar akan menempati posisi dominan, sebaliknya agen yang memiliki sedikit modal akan menempati posisi yang didominasi oleh agen dengan modal besar (Allolayuk, 2021).

Saat ini masyarakat modern terpisah menjadi banyak medan misalnya medan pendidikan, medan politik, medan ekonomi dan lain sebagainya (Mustikasari et al., 2023). Setiap medan memiliki aturan dan logikanya masing-masing. Struktur medan menciptakan system hierarkis yang ditentukan oleh modal yang tidak merata. Di dalam medan tercipta iklim untuk terus menerus bersaing guna mempertahankan posisinya di medan tersebut. Kedua hal ini menunjukkan bahwa setiap medan memiliki struktur ganda antara medan kekuatan dan medan perjuangan (Schirone, 2023).

Bourdieu melihat system pendidikan adalah tempat untuk melegitimasi dan melanggengkan struktur kelas (Allolayuk, 2021). Sekolah berjalan berdasarkan norma, nilai, dan visi-misi yang guna mencapai tujuan sekolah. Pada kenyataannya sekolah secara tidak sadar melegitimasi modal budaya dari kelas dominan (Retnosari, 2019). Kurikulum yang dikembangkan, metode pembelajaran, sampai pada penilaian mengarah pada penguasaan pengetahuan, Bahasa, dan cara berpikir yang lebih mengarah pada anak-anak kelas dominan. Anak-anak ini sudah memiliki modal untuk menguasai apa yang telah diharapkan oleh sekolah.

Anak-anak yang terbiasa dengan penggunaan bahasa internasional, memiliki sarana dan prasarana untuk belajar,

Berbeda dengan anak-anak kelas dominan, anak-anak dari kelas pekerja datang ke sekolah dengan bekal habitus dan modal budaya yang berbeda. Dimana mereka memiliki habitus yang tidak dihargai di sekolah. Ada anggapan bahwa anak-anak dari kelas pekerja kurang memiliki “*manner*” yang diharapkan oleh sekolah. Pengetahuan yang mereka miliki dianggap kurang relevan dengan system yang telah dibangun. Dalam konteks ini, banyak anak-anak dari kelas pekerja yang dianggap gagal yang sebenarnya bersumber dari ketidaksesuaian antara kebiasaan mereka dan tuntutan system yang telah dibangun oleh sekolah.

Meskipun beberapa penelitian telah menjelaskan bahwa reproduksi kelas sosial dalam pendidikan terjadi melalui modal ekonomi, budaya, sosial serta praktik institusional. Kajian pada Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini disebut sebagai Kota Pelajar belum terlaksana secara optimal. Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada konteks nasional atau daerah tertentu tanpa mengurai mengenai stratifikasi antar lembaga pendidikan di DIY terutama sekolah negeri favorit, sekolah swasta elit, dan sekolah swasta lapisan kedua yang menjadi tempat reproduksi ketimpangan yang khas. Selain itu, kajian yang secara sistematis menjelaskan bagaimana habitus siswa di provinsi DIY berkaitan dengan system zonasi, reputasi sekolah, serta akses fasilitas pendidikan di provinsi ini belum dilakukan dengan optimal. Minimnya analisis menunjukkan adanya celah dimana Kota Pelajar sebagai branding provinsi DIY justru menutupi proses reproduksi sosial yang bekerja melalui struktur sekolah dan kebijakan pendidikan lokal. Sebagai respon pada celah penelitian tersebut, studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana ketersediaan sekolah di pendidikan menengah atas di D.I Yogyakarta dan bagaimana kerangka teori Bourdieu melihat fenomena akses pendidikan menengah atas di D.I Yogyakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR) untuk melakukan analisis stratifikasi kelas sosial dalam pendidikan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama (Lewis, 2015; Merriam, 2009). Penggunaan data sekunder dalam penelitian kualitatif memungkinkan analisis komprehensif pada dinamika struktural dalam system pendidikan (Bowen, 2009).

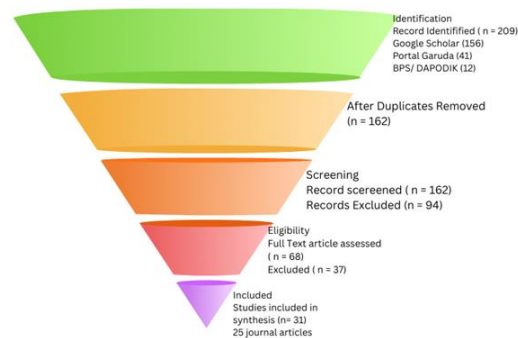
Penggunaan metode ini dilakukan untuk memastikan proses identifikasi, seleksi dan sistesis literatur dengan cara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Prosedur penelitian mengacu pada penggunaan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) dengan 4 empat tahapan yaitu *identification, screening, eligibility, dan inclusion*.

Pada tahapan *pertama* dilakukan dengan menentukan pertanyaan utama yang meliputi (1) Bagaimana sebaran sekolah negeri dan swasta memengaruhi aksesibilitas pendidikan menengah atas di DIY? (2) Bagaimana mekanisme habitus, modal, dan medan membentuk eksklusivitas pendidikan dalam struktur pendidikan menengah atas di DIY?. Kedua pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi untuk mencari literatur, kriteria seleksi, serta kerangka analisis.

Selanjutnya tahapan kedua dilakukan dengan penelusuran literatur dengan tiga sumber utama yaitu Google Scholar, Portal Garuda, serta dokumen resmi Pemerintah berupa BPS dan Dapodik DIY). Pencarian kemudian dilakukan dengan kombinasi kata kunci “Zonasi Yogyakarta”, “Pendidikan Menengah”, Sekolah Negeri dan Swasta DIY”, “Modal Budaya Bourdieu”. Penggunaan operator AND/OR digunakan dalam memperluas dan memfokuskan hasil pencarian. Pencarian telah dibatasi pada periode 2015 hingga 2024 dalam memastikan relevansi terhadap dinamika kebijakan zonasi dan perkembangan pendidikan kontemporer. Namun terdapat pengecualian pada karya teoritis utama seperti Pierre Bourdieu untuk menjadi fondasi konseptual penelitian. Ada dua kriteria yaitu kriteria inklusi yang meliputi 1) artikel jurnal nasional/ internasional terindeks, 2) dokumen kebijakan dan data statistik resmi pemerintah, 3) publikasi periode 2015-2024 (kecuali karya teoritis utama), 4) relevan dengan isu akses pendidikan, zonasi, diferensiasi sekolah negeri-swasta, atau reproduksi sosial. Kriteria Eksklusi meliputi: 1) artikel yang tidak berfokus pada pendidikan menengah atau konteks DIY, 2) dokumen tanpa dukungan data empiris, dan 3) literatur yang tidak mendukung analisis stratifikasi pendidikan.

Proses yang ketiga adalah seleksi literatur melalui PRISMA. Tahap identifikasi menghasilkan 209 dokumen dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan penghapusan duplikasi, sehingga terdapat 162 dokumen yang masuk pada tahap penyaringan. Pada tahap *screening*, dilakukan melalui pembacaan judul dan abstrak guna memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Terdapat 94 dokumen tereliminasi karena tidak sesuai dengan konteks DIY, tidak ada bahasan pendidikan menengah dan tidak ada relevansi dengan isu stratifikasi sosial. Maka dari itu terdapat 68 dokumen yang masuk ke tahap evaluasi penuh. Tahap *eligibility* dilakukan dengan membaca menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan metodologis dan

substansi. Pada proses ini terdapat 37 dokumen yang tereliminasi karena tidak memenuhi periode publikasi, tidak ada data yang memadai, dan tidak relevan dengan kerangka habitus-modal-medan. Maka sebanyak 31 studi dianggap memenuhi seluruh kriteria dan dimasukkan dalam sintesis akhir. Studi yang terseleksi terdiri atas artikel jurnal nasional dan internasional serta dokumen statistic resmi dari pemerintah. Diagram alur seleksi literatur disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Seleksi Literatur

Berikut merupakan tabel sintesis literatur utama yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Sintesis literatur utama

Klaster	Author Utama	Temuan Inti	Konsep Kunci	Relevansi untuk Analisis DIY
Reproduksi Sosial	Pierre Bourdieu (1986); Sullivan (2001); Collins (2011); Jæger & Møllegaard (2017); Yamamoto (2023)	Adanya legitimasi sekolah untuk distribusi modal kelas menengah melalui praktik akademik dan evaluasi	Habitus, modal budaya, bias institusional, reproduksi kelas	Menjelaskan dominasi siswa bermodal tinggi di sekolah negeri favorit & swasta elit DIY
Zonasi & Restrukturisasi Akses	Alfian (2019); Syakarofath et al. (2020a; 2020b); Wulandari et al. (2022); Bahri et al. (2020)	Kebijakan zonasi mengubah mekanisme seleksi, memunculkan strategi adaptif kelas menengah	Kebijakan zonasi Adaptasi kebijakan, restrukturisasi medan	Menjelaskan pergeseran dari prestasi → domisili serta dampaknya terhadap pasar sekolah swasta DIY
Privatisasi & Logika Pasar	Walton (2010); Yaacob et al. (2015); Carneiro et al. (2024); Joshi (2020); Huber et al. (2020)	Sekolah swasta menggunakan biaya sebagai mekanisme seleksi sosial	Pemasaran, seleksi berbasis harga, investasi pendidikan	Mendukung analisis biaya tinggi & uang pangkal sebagai penyaring sosial di sekolah elit DIY
Ketimpangan Struktural Indonesia	Muttaqin (2018); Santosa (2025); Young & Hannum (2025); Gupta (2023)	Ketimpangan akses dipengaruhi distribusi fiskal, kekuatan kelas menengah, dan strategi keluarga	Ketimpangan, kekuatan kelas menengah, mobilisasi modal	Menjelaskan ketimpangan geografis Sleman–Gunungkidul serta strategi keluarga menghadapi PPDB
Modal Budaya Keluarga	Yu et al. (2022); Luo et al. (2022); Allolayuk (2021); Meipiani et al. (2021)	Modal budaya dan simbolik menentukan keberhasilan akademik	Modal budaya keluarga dan reproduksi simbolik.	Menguatkan analisis habitus siswa & legitimasi simbolik sekolah favorit DIY

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan Teknik sintesis kualitatif tematik dengan tiga langkah yaitu: (1) mengidentifikasi tema-tema kunci terkait distribusi sekolah negeri-swasta, implementasi zonasi, diferensiasi kualitas sekolah, dan biaya pendidikan. (2) pengodean tematik menggunakan teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu dengan cakupan (a) habitus yaitu disposisi dan preferensi keluarga/ siswa untuk memilih sekolah, (b) modal meliputi modal ekonomi, budaya, sosial dan simbolik, (c) medan yaitu struktur kompetisi dan relasi kekuasaan pada system pendidikan menengah DIY. (3) Sintesis interpretative kemudian dilakukan dengan menghubungkan temuan berbagai literatur dengan data resmi untuk menjelaskan bagaimana distribusi sekolah, kebijakan zonasi, dan mekanisme pasar pendidikan dalam membentuk eksklusivitas dan reproduksi kelas sosial.

Validitas penelitian dilakukan melalui triangulasi sumber literatur akademik dengan data statistik pemerintah. PRISMA digunakan untuk transparansi proses seleksi literatur, kemudian konsistensi kerangka teoritis menjadi jaminan dalam keterhubungan analisis. Melalui pendekatan ini hasil penelitian adalah sistesis sistematis berbasis teori dan data.

Pendekatan ini menghasilkan pemaknaan kritis pada penelitian terhadap akses pendidikan menengah atas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjelaskan bagaimana ketimpangan pendidikan direproduksi melalui kebijakan dan institusi secara sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Dominasi Sekolah Swasta dalam Pendidikan Menengah Atas di Daerah Yogyakarta

Pemetaan bentuk institusi Sekolah Menengah Atas di DIY menunjukkan adanya perbedaan jumlah yang cukup jauh antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Adanya keterbatasan jumlah sekolah negeri muncul tendensi bahwa sebagian besar siswa memiliki pilihan untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta. Data menunjukkan jenjang Madrasah Aliyah (MA) pada tahun 2025 adanya perbedaan jumlah yang cukup jauh. Pada Madrasah Aliyah Negeri berjumlah 15 sekolah dan pada Madrasah Aliyah Swasta (MAS) berjumlah 65 sekolah. Perbandingan ini menunjukkan setiap satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) terdapat lebih dari tiga Madrasah Aliyah Swasta. Pola serupa ditemukan pula pada Sekolah Menengah Atas. Jumlah sekolah menengah atas swasta hampir dua kali lipat dari jumlah SMAN.

Berikut merupakan visualisasi perbedaan jumlah sekolah negeri dan swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan status dan kabupaten/kota Data 2024/2025

Tabel 2. Perbandingan Sekolah Menengah Atas (SMA & MA) di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Status dan Wilayah

Kab/ Kota	SMA Negeri	SMA Swasta	Perbandingan Negeri: Swasta	MA Negeri	MA Swasta	Perbandingan Negeri: Swasta	Total Sekolah Negeri	Total Sekolah Swasta	Perbandingan Total Negeri: Swasta
Bantul	19	18	1: 0,9	4	18	1:4,50	23	36	1: 1,56
Gunung Kidul	11	13	1:1,1	1	11	1:11,0	12	24	1: 2,00
Kota Yogyakarta	11	31	1: 2,8	2	5	1: 2,50	13	36	1: 2,67
Kulon Progo	11	6	1: 0,5	3	5	1: 1,66	14	11	1: 0,78
Sleman	17	31	1: 1,8	5	26	1: 5,20	22	57	1: 2,59
Total DIY	69	106	1: 1,5	15	65	1: 4,30	84	164	1: 1,95

Tabel 1 menunjukkan setiap satu sekolah negeri baik itu SMA atau MA terdapat tiga sekolah swasta. Angka perbandingan tersebut menunjukkan adanya fakta struktural yang menjelaskan system pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan sebagai salah satu aspek utama disediakan negara untuk memenuhi tujuan utama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun yang nampak adalah, negara justru tidak menyediakan pendidikan massal di tingkat menengah atas. Berbagai studi menjelaskan bahwa ketidakmerataan pendidikan di Indoensia berkaitan dengan adanya kegagalan struktural peran negara dalam menyediakan layanan pendidikan secara merata. Dijelaskan dalam "Inequality of Education in Indonesia by Gender, Socioeconomic Background and Government Expenditure," (2022) ketimpangan pendidikan pada tahun 2019 – 2020 memiliki keterkaitan dengan perbedaan pengeluaran pemerintah dan kondisi ekonomi di tingkat daerah. Hal ini berarti alokasi untuk pendidikan belum cukup untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara. Penelitian [Muttaqin \(2018\)](#) menyebutkan upaya pemerintah dalam memperbaiki akses pendidikan, namun masih banyak target yang belum tercapai karena situasi kompleks antara factor

manusia, sosial, ekonomi, politik, dan infrastruktur. Hal serupa juga diungkapkan oleh [Runiasih, M & Ahmad, M. \(2025\)](#) menunjukkan adanya disparitas pada kebijakan fiskal daerah dan tata kelola keuangan lokal yang membuat dana transfer dari pusat belum efektif. Beberapa esai dalam [Santosa \(2025\)](#) menjelaskan bahwa tidak merata akses dalam pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek antara lain distribusi fisik, guru, struktur politik, ideologi, dan kebijakan desentralisasi.

Dalam konteks sekolah negeri favorit, negara memiliki peran sebagai penyedia sejumlah kecil sekolah untuk diperebutkan. Misalnya bagaimana peran pemerintah menyediakan sarana prasarana bagi sekolah negeri favorit ([Helda & Syahrani, 2022](#)). Selain itu kebijakan zonasi ini juga merupakan bagian dari peran pemerintah dalam sekolah negeri favorit ([Madiana et al., 2022](#); [Perdana, 2019](#)). Dampaknya adalah, bagi siswa yang tidak mendapatkan kuota di sekolah negeri atau keluarga yang ingin melanggengkan modal budaya yang telah dibangun kemudian menentukan pendidikan anak-anak ini pada sekolah swasta.

Berdasarkan data di atas juga menunjukkan adanya ketidakmerataan jika dilihat dari sisi geografis. Jumlah sekolah negeri yang tidak merata mengakibatkan kekosongan pendidikan di beberapa wilayah. Di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki jumlah sekolah yang tinggi dibandingkan wilayah lain. Sedangkan di Kulon Progo dan Gunungkidul, perbandingan antara sekolah swasta dan sekolah negeri cenderung seimbang, walaupun di Gunungkidul perbandingan antara MA Negeri dibanding MA Swasta cukup naik menjadi 1: 11. Hasil temuan dari RISE (*Research on Improving System of Education*) mengonfirmasi adanya ketidakmerataan persebaran sekolah negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ([Arif et al, 2022](#)). Hal ini menunjukkan bahwa tempat seseorang tinggal menjadi pembeda utama untuk menentukan anak-anak dapat mendapat akses ke sekolah negeri. Hal ini diperparah dengan system zonasi yang berkembang di Indonesia ([Alfian, 2019](#)). Dibalik permasalahan perbedaan jumlah sekolah negeri di masing-masing wilayah, maka anak-anak yang menginginkan kualitas sekolah yang dianggap baik kemudian dihadapkan dengan pilihan pada sekolah swasta dengan biaya yang cukup tinggi.

Ketersediaan sekolah negeri favorit yang terbatas mengakibatkan munculnya banyak sekolah swasta. Sekolah swasta tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun di Indonesia ([BPS, 2024](#)). Sekolah swasta dengan biaya tinggi menciptakan model pendidikan yang nampak pada orientasi pasar. Dimana akses pendidikan dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga. Beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa sekolah swasta memiliki kecenderungan menetapkan biaya tinggi untuk membentuk citra elit ([Walton, 2010](#)). Hal ini berimplikasi pada sekolah swasta elit hanya bisa diakses oleh masyarakat kelas menengah atas, sedangkan masyarakat yang minim modal ekonomi akan tergeser pada sekolah swasta lapisan bawahnya ([Yu & Yanmin, 2024](#)). Penelitian di Indonesia menjelaskan privatisasi pendidikan, lemahnya pendanaan dan tingginya kompetisi antar sekolah berdampak pada kesenjangan antar kelompok sosial. Kesenjangan ini salah satunya ditunjukkan melalui ketidakmampuan masyarakat kelas menengah untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta ([Hidayati et al., 2022](#)).

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Dampak Sistem Domisili

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah sekolah negeri merupakan kondisi struktural. Maka dari itu adanya kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah cara untuk mengatur siapa yang bisa masuk ke sekolah negeri. Pemerintah pusat mengamanatkan kebijakan PPDB berbasis domisili yang kemudian diimplementasikan pada Peraturan Gubernur DIY. Kebijakan domisili yang sebelumnya adalah system zonasi ini memiliki tujuan antara lain: 1) meratakan akses pendidikan, menghapus label sekolah favorit, dan mendekatkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Namun, pada praktiknya kebijakan domisili justru menciptakan dampak yang justru memperkuat stratifikasi. Berikut merupakan analisis catatan untuk petunjuk teknis dalam PPDB DIY tahun ajaran 2024/2025 dalam perebutan sekolah negeri.

Table 3. Analisis Catatan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Jalur Pendaftaran	Kuota Presentase	Kriteria Seleksi	Keterbatasan
Zonasi Reguler	55 %	Domisili berdasarkan zona yaitu zona 1, 2, 3 dengan mempertimbangkan jarak kelurahan ke sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> Kedekatan geografis menjadi prioritas utama. Jika jarak sama, nilai akadeik menjadi penentu sekunder.
Afirmasi	20%	Calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, atau calon peserta didik yang menyandang disabilitas.	Diperlukan bukti dengan melampirkan kartu PKH (Program Keluarga Harapan) atau bukti

			surat keterangan yang lain.
Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali (PTO)	5%	Calon peserta didik yang orang tuanya guru atau dari orang tua yang pindah tugas. Dibuktikan dengan surat Keputusan.	Jika kuota ini tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur regular.
Prestasi	20%	Nilai gabungan dari nilai rapor dan ASPD dengan bobot tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya digunakan untuk luar zona 1 dari calon peserta didik. • Ada syarat nilai gabungan minimal.

Tabel 2 menjelaskan kebijakan PPDB dapat mengubah modal yang bisa digunakan untuk masuk sekolah negeri. Factor geografis mendapatkan alokasi 55% menjadi modal yang berharga mengalahkan prestasi akademik. Jalur prestasi yang menjadi harapan calon peserta didik berprestasi kuotanya hanya 20% dan terbatas secara geografis. Calon peserta didik tidak bisa menggunakan jalur jika mereka tidak masuk pada zona 1 misalnya.

Adanya kebijakan ini secara tidak langsung memberikan pasar bagi sekolah swasta (Syakarofath et al., 2020a). Dari sisi keluarga, keluarga kelas menengah atas mulai berpikir sekolah atau sistem pendidikan adalah investasi untuk menciptakan modal budaya bagi generasi selanjutnya. Gupta melihat melalui kerangka Boudieu menjelaskan bahwa keluarga kelas menengah perlu memobilisasi modal sosial untuk memperoleh akses pendidikan (Gupta, 2023). Modal budaya bisa berupa shadow education yang sudah diupayakan seperti bimbingan belajar, ketersediaan buku, sarana dan prasarana yang mendukung seakan tidak tersalurkan apabila tidak berhasil masuk ke sekolah negeri yang diharapkan (Yu et al., 2022). Kebijakan PPDB kemudian menjadi pemutus hubungan antara prestasi akademik dengan sekolah negeri favorit. Kebijakan ini seakan-akan mengarahkan anak-anak yang memiliki prestasi namun tidak bisa masuk ke sekolah negeri favorit harus berkompetisi di sekolah swasta yang elit demi mempertahankan modal budaya yang dimiliki. Dampaknya adalah, keluarga termotivasi untuk melanjutkan modal budaya yang telah dibangun dengan membayar biaya tinggi untuk memperoleh pendidikan yang dianggap berkualitas di sekolah swasta (Carneiro et al., 2024; Djazilan et al., 2023; Yaacob et al., 2015). Pilihan orang tua untuk mengeluarkan ekstra uang untuk pendidikan anaknya adalah usaha sadar untuk mempertahankan dan meningkatkan modal budaya yang ada. Pendidikan berkualitas dianggap sebagai investasi jangka panjang guna memperkuat posisi sosial keluarga. Reputasi sekolah, fasilitas, lingkungan belajar, serta keterlibatan orang tua menjadi pertimbangan memilih pendidikan. Pendidikan swasta dianggap menjadi alat strategis untuk mobilitas sosial. Membayar biaya tinggi pun kemudian dinormalisasikan untuk menciptakan modal budaya dan akademik yang diharapkan.

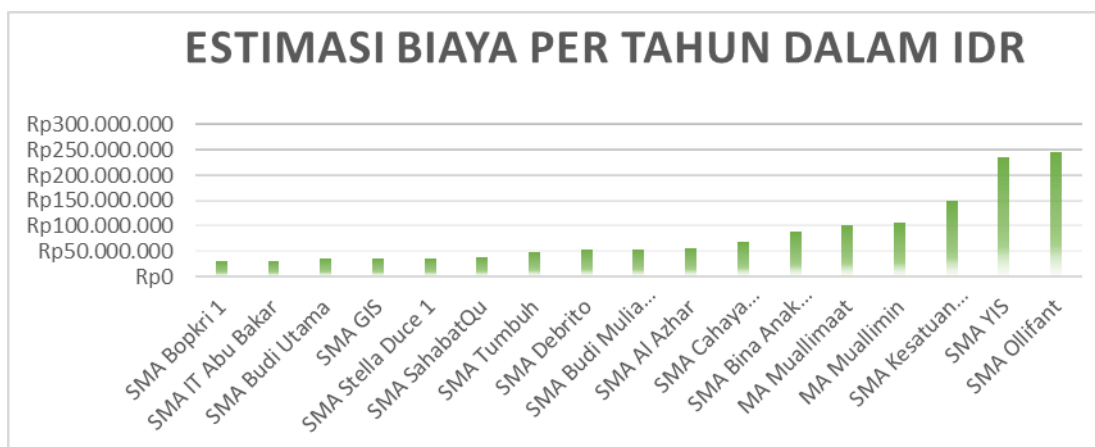
Dampak gandapun muncul dari kebijakan PPDB ini. Disisi lain kebijakan zonasi dapat meningkatkan akses bagi siswa dari latar belakang ekonomi menengah bawah untuk masuk ke sekolah negeri. Namun, zonasi menciptakan tantangan baru bagi guru (Bahri et al., 2020; Sinsyi & Setiadi, 2021; Ula & Lestari, 2020). Guru-guru di sekolah negeri favorit terbiasa dengan mengajar siswa dengan kemampuan akademik tinggi, saat ini harus menghadapi kelas dengan kemampuan akademik yang beragam. Situasi ini memaksa guru untuk beradaptasi pada kemampuan pedagogis yang nantinya berpotensi pada kualitas pembelajaran.

Jalur prestasi 20% bagi sekolah seakan menjadi angin segar bagi sekolah negeri. Situasi ini memungkinkan sekolah negeri favorit untuk tetap mendapatkan siswa berprestasi dari seluruh DIY. Angin segar ini merupakan wujud sekolah untuk mempertahankan reputasi sekolah negeri pada peringkat UTBK. Melalui peringkat UTBK sekolah negeri mempertahankan modal simbolis yang sudah dibangun dari generasi ke generasi.

Biaya Pendidikan Sekolah Swasta dan Kecenderungan pada Stratifikasi Pasar

Dampak dari kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendorong calon peserta didik untuk memilih sekolah swasta, maka modal ekonomi menjadi jalan untuk masuk di dalamnya. Bisa atau tidaknya masuk pada sekolah swasta yang dianggap berkualitas secara mendasar bergantung dengan kemampuan ekonomi keluarga calon peserta didik. Biaya pendidikan di beberapa SMA swasta yang cukup terkenal di Yogyakarta menunjukkan pada investasi yang dibutuhkan. Kondisi ini menciptakan semakin lebarnya kesenjangan sosial diantara kelas sosial.

Grafik 1 dibawah ini menunjukkan beberapa sekolah swasta dengan biaya yang tinggi. Beberapa sekolah yang masuk sebagai sekolah swasta terbaik memiliki biaya pendidikan yang berjenjang sehingga menunjukkan adanya stratifikasi di dalamnya:



Gambar 2. Estimasi Biaya Pendidikan di SMAS dan MAS elit di D.I. Yogyakarta

Grafik di atas menunjukkan adanya bukti sekolah berbasis ekonomi. Biaya puluhan juta hingga ratusan juta rupiah di sekolah-sekolah berada di luar jangkauan sebagian besar keluarga di DIY. Hal ini menyatakan bahwa kualitas di sekolah swasta memiliki harga yang cukup tinggi. Akses pendidikan tidak lagi sebagai kesempatan belajar, namun lebih pada kesempatan melalui kemampuan membayar biaya yang ditentukan oleh sekolah.

Setiap swasta elit memiliki komponen uang pangkal. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme eksklusif yang lebih mandalam. Berbeda dengan uang SPP bulanan yang harus dibayarkan setiap bulan, uang pangkal biasanya dibayar di awal atau bisa dibayarkan secara bertahap saat peserta didik diterima di sekolah. Banyak keluarga yang mampu membayar SPP bulanan, namun tidak untuk membayar uang pangkal. Uang pangkal yang dikenakan bagi peserta didik baru secara tersirat menjadi penyaring social ekonomi yang tidak bisa diganggu gugat.

Selain itu, grafik pada gambar 1 menunjukkan dalam sekolah swasta elit pun menunjukkan adanya lapisan. Terdapat sekolah untuk kelas atas dengan biaya lebih dari RP 200 juta, terdapat sekolah menengah hingga masih banyak sekolah swasta kelas bawah dengan biaya yang terjangkau. Situasi ini memperlihatkan bahwa sekolah swasta di DIY tidak hanya menjadi sarana alternatif untuk sekolah negeri, namun juga mereproduksi dan memperkuat struktur kelas atas di masyarakat. Memilih sekolah swasta menjadi proyeksi bahwa keluarga berada dalam tingkatan social ekonomi.

Tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta elit di Yogyakarta sejalan dengan literatur internasional yang menjelaskan bahwa pendidikan swasta di negara berkembang menjadi arena reproduksi kelas melalui harga dan akses. [Yaacob et al., \(2015\)](#) menjelaskan orang tua di Malaysia memilih sekolah swasta karena paket investasi yang memberikan keuntungan status dan kualitas, jadi biaya tinggi menjadi alat seleksi sosial. Penelitian lain menjelaskan sekolah swasta menciptakan stratifikasi sosial di pasar pendidikan, dimana kelompok masyarakat dengan ekonomi lebih besar bisa mengakses sekolah dengan kualitas yang diharapkan ([Carneiro et al., 2024](#)). Keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan dari sarana dan prasarana sekolah namun latar belakang keluarga siswa yang memiliki modal budaya tambahan seperti dukungan belajar dan biaya lain penunjang pendidikan ([Jung, 2025](#)). Penelitian di atas mendukung mengenai tingginya biaya sekolah swasta di DIY sesuai dengan grafik tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan pola global mengenai komersialisasi pendidikan dan penguatan stratifikasi kelas melalui pendidikan.

Pola global menunjukkan bahwa pendidikan merupakan komoditas. Keluarga yang mau membayar biaya sekolah tinggi akan mendapatkan fasilitas sekolah, reputasi, dan layanan yang dianggap bermutu. Dalam hal ini sekolah swasta berfungsi sebagai mekanisme seleksi sosial yang justru memperlebar stratifikasi sosial ([Joshi, 2020](#)). Studi eksperimental negara-negara berkembang memperjelas bahwa sekolah privat memproduksi diferensiasi akses dan hasil. Saat beberapa keluarga memilih dan membayar sekolah dengan fasilitas premium maka berimplikasi pada peningkatan ketimpangan antar kelompok. Ekspansi sektor swasta dan logika pasar pada sektor pendidikan akhirnya mendorong pengalihan tanggung jawab penyediaan mutu pendidikan dari negara ke individu, sehingga ketidaksetaraan justru semakin sistemik dan struktural. Teori pasar pendidikan menunjukkan mekanisme *sorting/cream-skimming* oleh sekolah swasta ([Bartlett et al., 2002](#); [Kopycka, 2021](#); [Lewis, 2015](#); [Merriam, 2009](#)). Dimana sekolah swasta memiliki hak untuk memilih murid dengan sumber daya dan prestasi tinggi. Hal ini nampak pada kota-kota besar di Indonesia termasuk di Yogyakarta.

Pendidikan Menengah Atas di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Kerangka Teori Pierre Bourdieu

Bourdieu menjelaskan bahwa medan merupakan ruang sosial yang terstruktur dimana actor berkompetisi dalam memperoleh dan mempertahankan berbagai bentuk modal (Bourdieu, 1986). Pada temuan penelitian di atas menjelaskan bahwa pendidikan menengah atas di DIY berfungsi sebagai medan sosial yang memiliki strata. Sekolah negeri favorit pada lapisan paling atas, diikuti sekolah swasta elit, kemudian sekolah negeri biasa dan terakhir sekolah swasta biasa. Sekolah-sekolah tersebut menempati posisi yang berbeda dalam struktur medan.

Ada kondisi medan yang timpang ketika ada keterbatasan sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa negara tidak hadir dalam menyediakan pendidikan menengah atas yang merata namun sebagai penyedia institusi langka yang justru diperebutkan. Kompetisi dalam medan pendidikan diperkuat dengan kondisi tersebut, akses ke sekolah negeri favorit adalah modal simbolik yang bernilai tinggi serta diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti dijelaskan pada kajian privatisasi dan pasar pendidikan yang merujuk pada kelangkaan institusi public akan mendorong kompetisi dan diferensiasi sosial (Urquiola, 2016; Young & Hannum, 2025).

Kebijakan PPDB berbasis domisili merupakan bentuk mekanisme restrukturisasi medan pendidikan. Tujuan awal kebijakan ini adalah pemerataan akses pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit. Namun, berdasarkan temuan penelitian, kebijakan PPDB berdasarkan zonasi justru mengubah jenis modal yang dominan dalam kompetisi pendidikan.

Jarak Lokasi antara tempat tinggal dengan sekolah menjadi bentuk modal baru yang menjadi peluang akses ke sekolah negeri, sementara prestasi dikurangi perannya melalui pembatasan kuota. Pada konsep Bourdieu, adanya perubahan aturan dalam medan tidak menghilangkan ketimpangan namun menggeser strategi actor sosial (Bourdieu, 1986). Sejalan dengan temuan (Alfian, 2019; Syakarofath et al., 2020b) keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah atas merespon perubahan ini dengan memindahkan ke modal yang lain, terutama modal ekonomi dan sosial melalui praktik pindah domisili, menggunakan jalur prestasi, dan memilih sekolah swasta elit.

Modal ekonomi berperan sentral dalam menentukan akses pendidikan. Hal ini nampak pada tingginya biaya pendidikan sekolah swasta elit. Biaya pendidikan hal ini berfungsi sebagai alat seleksi sosial yang bersifat eksklusif tidak hanya sebagai mekanisme pembiayaan saja. Modal ekonomi dilihat Bourdieu sebagai alat untuk mengkonversi modal budaya dan modal simbolik (Bourdieu, 1986). Dijelaskan dalam beberapa temuan bahwa keluarga dengan kemampuan membayar biaya pendidikan tinggi membeli layanan pendidikan, lingkungan sosial yang sehat dan mendukung pembelajaran, reputasi sekolah dan peluang reproduksi status sosial (Green, 2024; Murnane & Reardon, 2018; Rowe & Perry, 2020; Susanto et al., 2025). Dengan begitu, sekolah swasta elit merupakan arena reproduksi kelas dengan kemampuan membayar adalah syarat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Modal budaya adalah faktor yang menentukan keberhasilan akademik dan akses pendidikan. Modal budaya pada siswa menubuh, terobjektifikasi dan terlembagakan. Seperti yang dijelaskan Tilbrook & Shifrer (2022) dan Zhang et al., (2025) pada temuannya bahwa modal budaya adalah faktor penting pada keberhasilan akademik dan akses pendidikan. Pada temuan penelitian dijelaskan bahwa keluarga dengan modal budaya tinggi bisa menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, mulai dari ketersediaan sumber belajar, bimbingan tambahan, hingga pola komunikasi yang sesuai dengan ekspektasi sekolah.

Modal sosial juga berperan untuk memberikan akses informasi, rekomendasi, dan jaringan untuk masuk ke sekolah tertentu. Gabungan antara modal budaya dan modal sosial menjadi modal simbolik berupa prestise sekolah dan legitimasi sosial. Melalui gabungan keduanya, ketimpangan pendidikan justru terus menerus diproduksi walaupun kebijakan pemerataan dengan zonasi sudah dilakukan (Yamamoto, 2023).

Kebiasaan siswa terbentuk melalui proses panjang yang ditentukan oleh sosialisasi keluarga dan lingkungan sosial (Bourdieu, 1986). Siswa yang berasal dari keluarga kelas menengah atas akan memiliki kebiasaan yang sesuai dengan nilai, norma, dan tuntutan sekolah negeri favorit atau sekolah swasta elit. Kesesuaian ini membuat para siswa menjadi adaptif, berprestasi, dan berbakat dalam system pendidikan.

Berbading terbalik dengan siswa yang berasal dari keluarga kelas menengah bawah yang memiliki kebiasaan kurang dihargai oleh institusi pendidikan. Perbedaan Bahasa, interaksi, dan strategi belajar justru disalahpahami sebagai kurangnya kemampuan atau motivasi dalam pembelajaran. Seperti temuan (Collins, 2011; Sullivan, 2001) sekolah kehilangan fungsinya sebagai tempat mobilitas sosial yang tidak memihak, namun justru menjadi institusi yang mengafirmasi kebiasaan dominan dan secara simbolik mendisiplinkan habitus yang berbeda.

Temuan penelitian memberikan penguatan argument Bourdieu dimana system pendidikan sebenarnya tidak berdiri netral namun berperan dalam melegitimasi ketimpangan sosial. Branding “Kota Pelajar” di Daerah Istimewa Yogyakarta menutupi mekanisme struktural yang memberi ruang pada reproduksi kelas secara halus dan terselubung.

Sekolah negeri favorit dan sekolah swasta elit adalah instrumen legitimasi. Keberhasilan akademik dianggap sebagai hasil kemampuan individual saja tanpa mempertimbangkan modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi. Ketimpangan dianggap sebagai hal yang wajar dari perbedaan kemampuan individu. Yang sebenarnya adalah ketidakadilan struktural merupakan akar dari ketimpangan yang ada.

Tanpa adanya perbaikan dan intervensi struktural yang lebih baik dalam kebijakan, ketersediaan sekolah negeri, dan pendanaan sekolah swasta, Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta akan kehilangan fungsi utamanya sebagai agen mobilitas sosial. Kedepannya jika situasi tersebut masih bertahan pendidikan akan menjadi arena reproduksi kelas sosial.

Kesimpulan

Analisis di atas menunjukkan bahwa sekolah swasta di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencerminkan adanya tingkatan akses pendidikan. Terdapat tiga mekanisme yang saling menguatkan bahwa system pendidikan menengah menjadi alat melanggengkan stratifikasi yang kompleks yaitu: Terdapat keterbatasan structural dimana jumlah sekolah negeri tidak memadai dan menciptakan pasar sekolah swasta sehingga banyak peserta didik yang masuk di sekolah swasta. Meskipun zonasi memiliki tujuan baik namun secara praktik, Dampak penerapan kebijakan zonasi yang menciptakan permintaan baru bagi sekolah swasta dari masyarakat yang terhalang factor geografis dan memiliki kemampuan akademik rata-rata. Biaya pendidikan tinggi sekolah swasta elit yang menjanjikan berbagai fasilitas berfungsi sebagai langkah awal eksklusifitas bagi masyarakat yang memiliki modal ekonomi dan merupakan tembok penghalang bagi masyarakat yang lain.

Daftar Pustaka

- Alfian, M. A. (2019). Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6363>
- Allolayuk, A. (2021). Menyingkap Sisi Gelap Pendidikan sebagai Arena Reproduksi Kesenjangan Sosial Berdasarkan Perspektif Pierre Bourdieu. *Syntax Idea*, 3(8). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i8.1407>
- Arifin, M. H. (2017). The Role of Higher Education in Promoting Social Mobility in Indonesia. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 6(1), 233. <https://doi.org/10.26417/ejms.v6i1.p233-241>
- Azhari, A., & Suryanef, S. (2019). Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(5), 390–396. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.296>
- Azkiyani, R. N., Wiyani, N. A., & Sahnan, A. (2023). Manajemen Kelas Unggulan di MTs Negeri 3 Pematang. *Leader: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.32939/ljmpi.v1i1.2250>
- Baars, R. (2017). Social Reproduction Through Citizenship Education: Performing the Habitus of Pragmatic Compliance. In *Laboring and Learning*. https://doi.org/10.1007/978-981-287-032-2_20
- Bahri, A., Nawir, M., Syakur, A., & Junaidi, J. (2020). Persepsi Guru Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kec. Rappocini Makasar. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 16(29). <https://doi.org/10.36456/bp.vol16.no29.a2264>
- Bartlett, L., Frederick, M., Gulbrandsen, T., & Murillo, E. (2002). The Marketization of Education: Public Schools for Private Ends. *Anthropology & Education Quarterly*, 33(1). <https://doi.org/10.1525/aeq.2002.33.1.5>
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (1997). The Craft of Research. *College Composition and Communication*, 48(1). <https://doi.org/10.2307/358777>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Cakranegara, P. A. (2021). Faktor Diferensiasi Sekolah di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(2). <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i2.335>
- Carneiro, P., Das, J., & Reis, H. (2024). The Value Of Private Schools: Evidence From Pakistan. *Review of Economics and Statistics*, 106(5). https://doi.org/10.1162/rest_a_01237
- Collins, J. (2011). Literacy as social reproduction and social transformation: The challenge of diasporic communities in the contemporary period. *International Journal of Educational Development*, 31(6). <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2011.02.002>

-
- Devi, M., Suyatno, S., & Sukirman, S. (2022). School Branding Strategy In Facing The Impact Of Zoning System. *International Journal of Educational Management and Innovation*, 3(3), 288–304. <https://doi.org/10.12928/ijemi.v3i3.6089>
- Djazilan, S., Retnowati, E., Masnawati, E., Mardikaningsih, R., & Darmawan, D. (2023). Determinants of Parents' Decision to Choose Private Junior School. *International Journal of Elementary Education*, 7(4). <https://doi.org/10.23887/ijee.v7i4.69213>
- Fathul Janna, F., Asyifah, N., Kahriar, N., Irmawati, I., & Mukramin, S. (2023). Pendidikan dan Stratifikasi Sosial Dalam Realitas Universitas Muhammadiyah Makassar . *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(3). <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i3.3375>
- Green, F. (2024). Private schools and inequality. *Oxford Open Economics*, 3(Supplement_1). <https://doi.org/10.1093/ooec/odad036>
- Gupta, A. (2023). Revisiting educational advantage and social class: a Bourdieusian analysis of middle-class parents' investment in private schooling and shadow education. *British Journal of Sociology of Education*, 44(1). <https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2126824>
- Hart, C. S. (2019). Education, inequality and social justice: A critical analysis applying the Sen-Bourdieu Analytical Framework. *Policy Futures in Education*, 17(5). <https://doi.org/10.1177/1478210318809758>
- Helda, H., & Syahrani, S. (2022). National Standards of Education in Contents Standards and Education Process Standards in Indonesia. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2). <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.32>
- Holloway, S. L., & Pimlott-Wilson, H. (2019). Schools, Families, and Social Reproduction. In *Knowledge and Space* (Vol. 14). https://doi.org/10.1007/978-3-030-18799-6_14
- Hong, Y., & Zhao, Y. (2015). From capital to habitus: class differentiation of family educational patterns in urban China. *Journal of Chinese Sociology*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s40711-015-0021-y>
- Huber, E., Gunderson, J., & Stephens, J. D. (2020). Private education and inequality in the knowledge economy. *Policy and Society*, 39(2), 171–188. <https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1636603>
- Ignatow, G., & Robinson, L. (2017). Pierre Bourdieu: theorizing the digital. *Information Communication and Society*, 20(7). <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1301519>
- Jæger, M. M., & Møllegaard, S. (2017). Cultural capital, teacher bias, and educational success: New evidence from monozygotic twins. *Social Science Research*, 65. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2017.04.003>
- Joshi, P. (2020). Do private schools improve public school quality or increase stratification? *International Journal of Educational Development*, 77. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102219>
- Karjo, C. H. (2020). Relationship between High School National Exam Scores and College Admission Test Scores in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(5). <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i5/pr201721>
- Kopycka, K. (2021). Higher education expansion, system transformation, and social inequality. Social origin effects on tertiary education attainment in Poland for birth cohorts 1960 to 1988. *Higher Education*, 81(3). <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00562-x>
- Lewis, S. (2015). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Health Promotion Practice* (Vol. 16, Number 4). <https://doi.org/10.1177/1524839915580941>
- Lin, M. (2020). Educational Upward Mobility. Practices of Social Changes--Research on Social Mobility and Educational Inequality. *International Journal of Social Science Studies*, 8(3), 25. <https://doi.org/10.11114/ijsss.v8i3.4789>
- Luo, Y., Liu, D., & Qu, Y. (2022). Revisiting social reproduction theory: Exploring the influence of economic and cultural capital on students' achievement in China. *International Journal of Educational Research*, 116. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102082>
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c). <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>
- Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, & Wiryanto. (2022). Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3). <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>
- Mayasari, T., & Paidi, P. (2022). Analisis Kemampuan Literasi Sains Siswa Kelas XI SMA Negeri di Kota Yogyakarta Mata Pelajaran Biologi Ditinjau dari Kefavoritan Sekolah. *Jurnal Edukasi Biologi*, 8(2), 86–97. <https://doi.org/10.21831/edubio.v8i2.18212>
- Meipiani, C. A., Febriani, L., & Cholilah, J. (2021). Inovasi Pendidikan : Upaya Penyelesaian Masalah Reproduksi Kelas Sosial Pada Sistem Pendidikan di SMA Santo Yosef Pangkalpinang. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(2). <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i2.17>
-

- Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. In *The JosseyBass higher and adult education series* (Vol. 2nd). <https://doi.org/10.1097/NCI.0b013e3181edd9b1>
- Mua, M. M. (2017). Pelajar Papua dalam Kuasa Simbolik (Studi Terhadap Reproduksi Kelas Sosial di SMK Negeri 1 Obaa, Mappi, Papua). *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(2). <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.092-07>
- Murnane, R. J., & Reardon, S. F. (2018). Long-Term Trends in Private School Enrollments by Family Income. *AERA Open*, 4(1). <https://doi.org/10.1177/2332858417751355>
- Mustikasari, M., Arlin, A., & Kamaruddin, S. A. (2023). Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1). <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>
- Muttaqin, T. (2018). Determinants of Unequal Access to and Quality of Education in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(1). <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.27>
- Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks. *Cal.: Sage Publications*.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi Ppdb Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1). <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- Pracipta, K. I. (2021). Faktor-Faktor Determinasi Keputusan Orang Tua Memilih Sekolah Dasar Swasta Untuk Anak di Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 10(3). <https://doi.org/10.21831/sakp.v10i3.17458>
- Retnosari, P. (2019). Kekerasan Simbolik Pada Sistem Pendidikan Negeri di Indonesia. *Jurnal Widyaloka IKIP Widiya Dharma*, VOL.6 NO 3(ISSN 0854-0810).
- Ridder, H. G., Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis. A methods sourcebook. *Zeitschrift Fur Personalforschung*, 28(4).
- Rowe, E., & Perry, L. B. (2020). Private financing in urban public schools: inequalities in a stratified education marketplace. *Australian Educational Researcher*, 47(1). <https://doi.org/10.1007/s13384-019-00328-0>
- Santosa, I. S. (2025). Education in Indonesia: Critical perspectives on equity and social justice. *Diaspora, Indigenous, and Minority Education*. <https://doi.org/10.1080/15595692.2025.2523905>
- Schirone, M. (2023). Field, capital, and habitus: The impact of Pierre Bourdieu on bibliometrics. *Quantitative Science Studies*, 4(1), 186–208. https://doi.org/10.1162/qss_a_00232
- Sinsyi, M. M., & Setiadi, Y. (2021). Perbedaan Kualitas Sekolah Unggulan di Kabupaten Banyuwangi Setelah Diberlakukannya Sistem Zonasi Studi Kasus di SMPN 1 Banyuwangi. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1). <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.1015>
- Štrangarić, S., & Lukić, V. R. (2024). Model of effects of cultural capital and educational habitus on PISA competencies of pupils: an example of Serbia and Croatia. *Sociologija*, 66(1), 28–44. <https://doi.org/10.2298/SOC2401028S>
- Sullivan, A. (2001). Cultural capital and educational attainment. *Sociology*, 35(4). <https://doi.org/10.1177/0038038501035004006>
- Suryani, R. M., Hartono, H., & Siahaan, S. M. (2023). The Validity of Problems Similar to PISA Local Context of North Sumatra Refers to the Components of the PISA Scientific Literacy Framework. *Journal of Curriculum Indonesia*, 6(1), 76. <https://doi.org/10.46680/jci.v6i1.78>
- Susanto, T. T. D., Agnes Malyka, Harun Fauzi, Najwa Faradisa, Nasywa Rifatul, & Tsabita Malfanda. (2025). Biaya Tersembunyi dan Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1021>
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020a). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2). <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020b). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Tan, C. Y., & Liu, D. (2022). Typology of habitus in education: Findings from a review of qualitative studies. In *Social Psychology of Education* (Vol. 25, Number 6). <https://doi.org/10.1007/s11218-022-09724-4>
- Tarkhnishvili, A., Tarkhnishvili, L., & Strielkowski, W. (2022). Factors influencing the choice of private or public schools: Evidence from Georgia. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.910593>
- Tilbrook, N., & Shifrer, D. (2022). Field-specific cultural capital and persistence in college majors. *Social Science Research*, 103. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2021.102654>

-
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1). <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.375>
- Urquiola, M. (2016). Competition Among Schools: Traditional Public and Private Schools. In *Handbook of the Economics of Education* (Vol. 5). <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63459-7.00004-X>
- Wahyudi, M. A., & Lutfi, A. (2019). Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2).
- Walton, N. (2010). The price of admission: Who gets into private school, and how much do they pay? *Economics of Education Review*, 29(5). <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2010.04.004>
- Wulandari, D. A., Arzaqi, N., Alfirdaus, L. K., & Yuwanto, Y. (2022). Evaluasi PPDB Sistem Zonasi Tahun 2021/2022 dalam Pelayanan Publik Sektor Pendidikan oleh Ombudsman RI Jawa Tengah. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 64. <https://doi.org/10.20961/sp.v17i1.64246>
- Yaacob, N. A., Osman, M. M., & Bachok, S. (2015). An Assessment of Factors Influencing Parents' Decision Making When Choosing a Private School for their Children: A Case Study of Selangor, Malaysia: for Sustainable Human Capital. *Procedia Environmental Sciences*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.050>
- Yamamoto, Y. (2023). *Education, Cultural Capital, and Social Class Reproduction*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36331-3_16
- Young, N. A. E., & Hannum, E. (2025). Middle-Class Economic Power and the Evolution of Educational Systems. *Research in Social Stratification and Mobility*. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2025.101112>
- Yu, S., Liu, Y., & Guo, R. (2022). "How does my family affect me?" The family cultural capital impact on Chinese junior high school students' academic achievement. *Thinking Skills and Creativity*, 46. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101146>
- Zhang, R., Chiang, T. H., MacKenzie, A., & Thurston, A. (2025). Practicing the economic-cultural-capital association through education as rational capital in school choice. *International Journal of Educational Research*, 134. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2025.102831>